



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH DALAM PENGELOLAAN APBD  
PEMERINTAHAN KOTA BINJAI  
TAHUN 2013-2017**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**REZKI ANNISA**  
NPM 1515100002

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDE  
MEDAN  
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : REZKI ANNISA  
NPM : 1515100002  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : S1 (STRATA SATU)  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PENGELOLAAN APBD PEMERINTAH KOTA  
BINJAI TAHUN 2013-2017

Medan, Juli 2019

**KETUA PROGRAM STUDI**

(Anggi Pratama Nasution, SE.,M.Si)

**PEMBIMBING I**

(Dr. Renny Maisyarah, SE.,M.Si, Ak.CA)

**DEKAN**

(Dr. Surya Nita, SH.,M.Hum)

**PEMBIMBING II**

(Anggi Pratama Nasution, SE.,M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH  
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

**PERSETUJUAN UJIAN**

NAMA : REZKI ANNISA  
N.P.M : 1515100002  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : S1 (SETRATA SATU)  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN APBD  
PEMERINTAHAN KOTA BINJAI TAHUN 2013-2017

Medan, Juli 2019

**KETUA**



(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

**ANGGOTA I**

(Dr. Renny Maisyarah, SE., M.Si, Ak.CA)

**ANGGOTA II**

(Heriyati Chrisna, SE., M.Si)

**ANGGOTA III**

(Drs. Abdul Hasyim BB, Ak., MM)

**ANGGOTA IV**

(Junawan, SE., M.Si)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : REZKI ANNISA  
NPM : 1515100002  
Fakukultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PENGELOLAAN APBD  
PEMERINTAHAN KOTA BINJAI  
TAHUN 2013-2017

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil penelitian karya tulis saya yang sendiri da bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengahli-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Juni 2019



(REZKI ANNISA)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : REZKI ANNISA  
NPM : 1515100002  
Fakukultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PENGELOLAAN APBD  
PEMERINTAHAN KOTA BINJAI  
TAHUN 2013-2017

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan dimasa yang akan mendatang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Juni 2019



(REZKI ANNISA)



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REZKI ANNISA  
 Tanggal Lahir : / 22 Februari 1998  
 NIM : 1515100002  
 Jurusan : Akuntansi  
 Bidang Studi : Akuntansi Sektor Publik  
 SKS yang telah dicapai : 127 SKS, IPK 3.62  
 Mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul SKRIPSI	Persetujuan
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN APBD PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN 2013-2017	<input checked="" type="checkbox"/>
ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA BINJAI	<input type="checkbox"/>
PENGARUH SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET DAERAH) PEMKO BINJAI	<input type="checkbox"/>

Disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda



Rektor I  
  
 ( Bhakti Alamasyah, M.T., Ph.D. )

Medan, 27 September 2018

Pembimbing I  
  
 ( Rezki Annisa )

Nomor : .....  
 Tanggal : .....  
 Disetujui oleh:  
 Dekan  
 ( Dr. Suryadi, S.P., M.Hum. )  
 Tanggal : 23 September 2018  
 Disetujui oleh:  
 Ka. Prodi Akuntansi  
  
 ( Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si. )


Tanggal : 27 September 2018  
 Disetujui oleh:  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 ( Dr. Renny Maryam )  
 Tanggal : 29 September 2018  
 Disetujui oleh:  
 Dosen Pembimbing II:  
  
 ( Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si. )



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

: Universitas Pembangunan Panca Budi  
 : SOSIAL SAINS  
 Pembimbing I : Dr. RENNY MAISYARAH  
 Pembimbing II : ANGGI PRATAMA NASUTION, SE, M.Si  
 : REZKI ANNISA  
 Program Studi : Akuntansi  
 NIM : 1515100002  
 Pendidikan : STRATA I  
 Judul Akhir/Skripsi : ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PENGELOLAAN APBD PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN  
2013 - 2017

NO	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
209	Acc Seminar Proposal		

Medan, 16 Februari 2019

Diketahui/Ditetujui oleh :

Dekan



Dr. Surya Wita, S.H., M.Hum.



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id  
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Jurusan : SOSIAL SAINS  
 Pembimbing I : BRS Renny Maisyarah  
 Pembimbing II : Anggi Pratama Nasution, S.E.M,si  
 Mahasiswa : REZKI ANNISA  
 Program Studi : Akuntansi  
 Pokok Mahasiswa : 1515100002  
 Tingkat Pendidikan : Strata 1  
 Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2013-2017

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Latar belakang diperbaiki</li> <li>- Identifikasi dan Batasan Masalah diperbaiki</li> <li>- Rumusan masalah diubah</li> <li>- Menggunakan pp 71</li> <li>- Daftar Isi dicantumkan halaman depannya.</li> <li>- UU diperbaharui</li> </ul>		
19.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisi masalah &amp; tujuan</li> <li>- K.K.</li> <li>- Revisi BAB I, II, III</li> <li>- Kata-kata yang kurang</li> <li>- Sumber data</li> </ul>		

- Revisi operasional variabel  
- Revisi tabel

Medan, 08 Maret 2019  
Diketahui/Disetujui oleh :  
Dekan,



Dr. Surya Njor, S.H., M.Hum.






**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Pembimbing I : Drs. Renny Marsyarah  
 Pembimbing II : Anngi Pratama Nantion, SE, M.Si  
 Mahasiswa : REZKI ANNISA  
 Program Studi : Akuntansi  
 Pokok Mahasiswa : 1515100002  
 Pendidikan : Strata 1  
 Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam  
 Pengelolaan APBD Pemerintah Daerah Kota Binjai  
 Tahun 2013 - 2017

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
03/19	- Pembaca Rumusan tabel Definis operasional Variabel Narasi kualitatif Acc. Formasi proposal		

Medan, 12 Maret 2019  
 Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan,




Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Nama : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Jurusan : SOSIAL SAINS  
 Pembimbing I : DR. RENNY MAISYARAH, SE., AK., M.Si.  
 Pembimbing II : ANGGI PRATAMA NASUTION, SE., M.Si.  
 Mahasiswa : REZKI ANNISA  
 Program Studi : Akuntansi  
 NIM / NPM : 1515100002  
 Bidang Pendidikan : SI  
 Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM  
 PENGELOLAAN APBD PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN 2013/2017

NO	WAKTU	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
1	1-2019	Acc Meja Hijau .		

Medan, 24 Mei 2019  
 Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : **SOSIAL SAINS**  
 Pembimbing I : Dr. RENNY MAHYARAH, SE., Ak., M.Si  
 Pembimbing II : ANEGL PRATAMA NASUTION, SE M.Si  
 Mahasiswa : REZKI ANNISA  
 Program Studi : Akuntansi  
 Pokok Mahasiswa : 1515100002  
 Pendidikan : S1  
 Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN APBD PEMERINTAHAN KOTA BINJAI TAHUN 2015/2016

WAKTU	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
12/06/19	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Review Cover</li> <li>- Abstract</li> <li>- Daftar Isi</li> <li>- BAB I</li> <li>- Tambahan Grafik</li> </ul>		
13/06/19	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisi pembahasan</li> <li>- Depth future</li> </ul>		
14/06/19	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acc. Gidy Mega Hyman</li> <li>- Revisi Substantive</li> </ul>		

Medan, 15 Juni 2019  
 Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

TANDA BEBAS PUSTAKA

No. 2539/Perp/Bp/2019

Dinyatakan tidak ada sangkut

UNPT Perpustakaan

28 JUN 2019

UNPT Perpustakaan

FN-BPAA-2012-041

Medan, 28 Juni 2019  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAB Medan  
Di-

Telah Diperiksa oleh LPMU  
dengan Plagiarisme... 53%  
Medan, 28 Juni 2019

AN. Ka. LPMU  
UNPAB

HUNI M. RITONGA, BA., MSc.  
Lahya Pradono, SE., MM

Pemohonan Meja Hijau

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REZKI ANHISA  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 22 Februari 1998  
Nama Orang Tua : SUDARNO  
NIM : 1515100002  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Akuntansi  
No. HP : 085760734096  
Alamat : Jl. Balam Gg. Lebeh No. 29 A

Saya bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI DALAM PENGELOLAAN APBD PENERINTAHAN KOTA BINJAI TAHUN 2013-2017, Selanjutnya saya menyatakan:

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Tertampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Tertampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Tertampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Tertampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah di jilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Tertampir surat keterangan BKROL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,100,000</b>

Ukt. 8-12

Rp 1.700.000

Rp 3.800.000

28/06/19

Ukuran Toga :

S

Disetujui oleh :

Surya Hita, S.H., M.Hum.  
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya

REZKI ANHISA  
1515100002

DAFTAR :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
  - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

Telah di terima  
berkas persyaratan  
dapat di proses  
Medan, 28 JUN 2019

an. M. BPAA

TEGUH WAHYONO, SE., MM.

### Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 27/06/2019 15:30:44

# REZKI ANNISA\_1515100002\_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- 88 wrds: 12563 <http://kuduskab.go.id/arsip/pdf/raskpd2016.pdf>
- 88 wrds: 7234 [http://balitbang.pemkomedan.go.id/tinymceplik/gambarfile/2.%20Lazya%20082273487084\).pdf](http://balitbang.pemkomedan.go.id/tinymceplik/gambarfile/2.%20Lazya%20082273487084).pdf)
- 88 wrds: 6517 [https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran\\_Pendapatan\\_dan\\_Belanja\\_Negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara)

Other Sources:]

Processed resources details:

203 - Ok / 38 - Failed

Other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:



Not Detected!

Google Books:



[not detected]

Ghostwriting services:



[not detected]

Anti-cheating:



[not detected]

Excluded Urts:

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Binjai Tahun 2013-2017 dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif yang dihitung berasal dari data Anggaran dan Realisasi Pendapatan Belanja Daerah Kota Binjai dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data skunder, data yang diperoleh dari dokumen laporan anggaran dan realisasi berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Binjai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dinyatakan kurang baik yang diukur dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD dan rasio efesiensi keuangan daerah. Hal ini dapat dibuktikan melalui (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan keaungan daerah masih rendah sekali termasuk pola hubungannya Instruktif karena nilai persentase berada dibawah 25%. (2) Rasio Efektivitas PAD menunjukkan dinyatakan kurang efektif karena dari hasil pengelolaan nilai masih dibawah 100%. (3) Rasio Efesiensi Keuangan Daerah dinyatakan kurang efesien karena berdasarkan perolehan nilai menunjukkan diatas 90%-100%.

**Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efesiensi Keuangan Daerah**

## **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the Financial Performance of the Binjai City Government in 2013-2017 using the descriptive approach method. The type of data used in the study is the quantitative data calculated from the Budget data and the Realization of the Binjai City Regional Expenditures and the data sources used in this research are secondary data, data obtained from budget report documents and realization comes from the Revenue Financial Management Agency and Regional Assets. The results of the analysis of this study indicate that the Financial Performance of the Binjai City Government in the Management of Regional Revenue and Budget Management is stated to be less well measured by using the regional financial independence ratio, the effectiveness ratio of PAD and the efficiency ratio of regional finance. This can be proven through (1) the Regional Financial Independence Ratio showing that the level of regional capability is still very low including Instructive relations patterns because the percentage value is below 25%. (2) Effectiveness Ratio of PAD shows that it is declared to be less effective because the results of management of values are still below 100%. (3) Regional Financial Efficiency Ratio is stated to be inefficient because based on the acquisition of the value shows above 90% -100%.*

**Keyword: Government Financial Performance, Regional Financial Independence Ratio, Effectiveness Ratio PAD, Regional Financial Efficiency Ratio**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “ **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Pemerintahan Kota Binjai Tahun 2013-2017**”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan Penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala Tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H Muhammad Isa Indrawan, SE.,M.M sebagai Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan selaku Dosen Pembimbing II yang sudah banyak membantu dan memberikan masukan di dalam perbaikan skripsi saya.
4. Ibu Dr. Renny Maisyarah, SE, M.Si, Ak.CA selaku Dosen Pembimbing I (satu) yang sudah banyak membantu dan memberikan kritik dan saran dalam perbaikan skripsi saya.



5. Teristimewa untuk Ibu saya Rosalinda dan Ayah saya Sudarno, Kakak saya Dina Ananda, Amd yang telah mendukung, memotivasi dan mendoakan saya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Untuk Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Binjai , Badan Pengawasan Daerah Pemerintah Kota Binjai, Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Binjai, dan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Binjai
7. Serta dukungan dari orang terdekat saya Arif A Hendivo, Amd dan para sahabat-sahabat saya Riza Septika Sari, S.E, Wina Azhari, S.E, Yayuk Wulandari dan Intan Meta Sari Sitanggung yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta motivasi kepada saya.

Demikian skripsi ini diselesaikan, semoga skripsi ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi penulis. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

Medan, Juli 2019

Penyusun

(Rezki Annisa)

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Landasan Teori.....	10
1. Devinisi Kinerja Keuangan Daerah .....	10
2. Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah.....	10
3. Tujuan Sistem Pengukuran .....	15
4. Kemampuan Keuangan Daerah.....	15
5. Pengelolaan Keuangan Daerah .....	17
6. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	18
7. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	20
8. Ruang Lingkup Keuangan Daerah .....	21
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	21
10. Kebijakan Penyusunan APBD .....	23
11. Fungsi APBD .....	27
12. Dasar Hukum Keuangan Daerah.....	28
B. Penelitian Terdahulu .....	29
C. Kerangka Konseptual .....	33
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Jenis dan Sumber Data.....	36
D. Devinisi Operasional Variabel.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisa Data .....	37

<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Hasil Penelitian .....	39
1. Profil Kota Binjai .....	39
a. Kondisi Geografis .....	39
b. Pemerintahan Kota Binjai .....	40
c. Visi dan Misi Kota Binjai .....	42
d. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Binjai.....	42
2. Analisis Data .....	49
a. Rasio Keuangan Kemandirian Keuangan Daerah.....	54
b. Rasio Efektivitas PAD .....	54
c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah .....	59
B. Pembahasan.....	61
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....	62
2. Rasio Efektivitas PAD .....	63
3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah .....	64
 <b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	 <b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	64

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	34
Gambar 4.1 Peta Kota Binjai .....	48
Gambar 4.2 Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	56
Gambar 4.3 Grafik Rasio Efektivitas Keuangan Daerah .....	58
Gambar 4.4 Grafik Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	60

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Table 1.1 Klasifikasi Kemampuan Keuangan Pemerintah Kota Binjai Tahun 2013-2017.....	4
Tabel 1.2 Originalitas Penelitian.....	8
Tabel 2.1 Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah.....	12
Tabel 2.2 Efektivitas PAD.....	14
Tabel 2.3 Efisiensi Keuangan Daerah.....	15
Tabel 2.4 Mamping Penelitian Sebelumnya.....	29
Tabel 3.1 Jadwal Proses Penelitian.....	35
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel.....	36
Tabel 4.1 Laporan Realisasi APBD Untuk Tahun Berakhir Sampai 31 Desember 2013.....	49
Tabel 4.2 Laporan Realisasi APBD Untuk Tahun Berakhir Sampai 31 Desember 2014 dan 2013.....	50
Tabel 4.3 Laporan Realisasi APBD Untuk Tahun Berakhir Sampai 31 Desember 2015 dan 2014.....	51
Tabel 4.4 Laporan Realisasi APBD Untuk Tahun Berakhir Sampai 31 Desember 2016 dan 2015.....	52
Tabel 4.5 Laporan Realisasi APBD Untuk Tahun Berakhir Sampai 31 Desember 2017 dan 2016.....	53
Tabel 4.6 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Kota Binjai Tahun Anggaran 2013-2017.....	55
Tabel 4.7 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kota Binjai Tahun Anggaran 2013-2017.....	58
Tabel 4.8 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2013-2017.....	60
Tabel 4.9 Rekapitulasi Rasio Keuangan Daerah Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2013/2017.....	61

# BAB I PENDAHULUAN

## **A. Latar Belakang**

Lembaga pemerintah merupakan suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintah dibentuk untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Pembentukan pemerintah sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat pemerintah membentuk peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan dan lain sebagainya.

*Good governance* di Indonesia sendiri diterapkan sejak meletusnya era reformasi yang dimana pada era tersebut terjadi perubahan sistem pemerintah yang menuntut proses demokratis yang bersih sehingga *good governance* merupakan alat reformasi yang harus diterapkan dalam pemerintahan baru sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah negara, kota, dan sebagainya. Pemerintah dilihat dari sifatnya yang meliputi seluruh kekuasaan yaitu, kekuasaan *legislatif*, kekuasaan *eksekutif*, dan kekuasaan *yudikatif*.

Pengelolaan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota memasuki era baru sejalanannya dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Daerah yang mengatur

Masalah otonomi daerah dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara <sup>Pemerintah</sup> Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang- undang tersebut mengatur pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dan efesiensi penyelenggara fungsi pemerintah daerah. Sejalan dengan perubahan undang- undang otonomi tersebut, tentunya membawa perubahan dalam pengelolaan fiskal pemerintah daerah. Perubahan ini membuat pemerintah daerah diharapkan lebih mampu dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan saran dan prasarana publik. Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri dari sisi perencanaan, pembangunan maupun pembiayaan. Untuk itu di perlukannya upaya agar kinerja keuangan pemerintah handal dan dapat di percaya. Agar kinerja keuangan pemerintah dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah tersebut.

Penyelenggaraan otonomi pemerintah daerah perlu didukung oleh sumber daya manusia (SDM) dan sumber pembiayaan yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat

pencapaian suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila kinerjanya tidak sesuai dengan yang direncanakan maka kinerjanya kurang baik.

Analisis kinerja keuangan dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi yang akan berlanjut. Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pedoman penyusunan APBD merupakan pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. Sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Binjai adalah salah satu kota dalam wilayah Provinsi Sumatra Utara Indonesia. Salah satu instrumen Pemerintah Kota Binjai yang dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh kemampuan daerah di dalam menjalankan kegiatan



pembangunan dan kegiatan Pemerintah Kota Binjai dalam memberi pelayanan kepada publik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan daerah, dimana menggambarkan anggaran pengeluaran yang berguna untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran dan disisi lain menggambarkan penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Berdasarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Binjai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Klasifikasi Kemampuan Keuangan Pemerintah Kota Binjai**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	Pendapatan Umum Daerah	554.821.288.814	626.131.923.723	641.941.328.691	703.776.399.509	697.806.362.356
	Jumlah	554.821.288.814	626.131.923.723	641.941.328.691	703.776.399.509	697.806.362.356
2	Gaji dan Tunjangan	299.674.345.732	317.078.314.153	338.841.975.049	361.283.810.976	311.896.015.840
3	Tambahan Pengasilan	-	-	-	-	101.241.417.260,00
	Jumlah	299.674.345.732	317.078.314.153	338.841.975.049	361.283.810.976	413.137.433.100
	Selisih	255.146.943.082	309.053.609.570	303.099.353.642	342.492.588.533	284.668.929.259
	Jenis Kategori Kota	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Kecil

*Sumber : BPKPAD Kota Binjai*

Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) tingkat kemampuan keuangan Pemerintah Kota Binjai berdasarkan tahun 2013-2016 dikategorikan sebagai Kota Sedang, karena jika dilihat dari rata-rata selisih realisasi pada tahun tersebut tidak mencapai Rp.400.000.000.000. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional dikatakan Kota Besar apabila rata-rata jumlah realisasi mencapai di atas Rp. 400.000.000.000.

Pada tahun 2017 Pemerintah Kota Binjai dikategorikan sebagai Kota Kecil, karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dikatakan Kota Besar apabila rata-rata realisasi mencapai angka Rp. 550.000.000.000.

Dari data klasifikasi kemampuan keuangan Pemerintah Kota Binjai di atas bahwa Pemerintah Kota Binjai mengalami penurunan dari kategori kota. Penurunan tersebut diduga dapat mempengaruhi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai. Pemerintah Kota Binjai dipandang belum maksimal dalam mencapai target realisasi yang ditetapkan. Untuk itu diperlukannya analisis pengukuran kinerja keuangan melalui rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi untuk melihat seberapa besar kemampuan Pemerintah Kota Binjai dalam pengelolaan APBD.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Dalam Pengelolaan APBD Pemerintahan Kota Binjai Tahun 2013-2017**”

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

- a. Terjadinya penurunan Pendapatan Umum Daerah pada tahun 2017 sebesar Rp. 697.806.362.359
- b. Terjadinya penurunan Gaji dan Tunjangan pada tahun 2017 sebesar Rp. 311.896.015.840
- c. Terjadinya penurunan kategori kota pada tahun 2017 dari Kota Sedang menjadi Kota Kecil hal ini menyebabkan masih kurangnya kemampuan kinerja keuangan di Pemerintah Kota Binjai dalam mencapai target realisasi anggaran.

### **2. Batasan Masalah**

Mengingat masalah yang timbul, maka di perlukan batasan masalah agar menghindari masalah dan presepsi yang berkaitan dengan penelitian. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada “Pengukuran Kinerja Keuangan yang dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Dalam Mengelola APBD Kota Binjai Tahun 2013-2017.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai berdasarkan rasio kemandirian?

2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai berdasarkan rasio efektivitas PAD?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai berdasarkan rasio efesiensi?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **a. Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini untuk mengetahui :

- a. Untuk menganalisis bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah.
- b. Untuk menganalisis bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai berdasarkan rasio efektivitas PAD.
- c. Untuk menganalisis bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai rasio efesiensi keuangan daerah.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dalam menganalisis kinerja keuangan dengan menerapkan Rasio Kemandirian Keuangan Dearah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efesiensi Keuangan Daerah dalam pengelolaan APBD Kota Binjai Tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut :

##### **a. Manfaat Bagi Pemerintah**

Penelitian ini dapat di harapkan berguna sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Binjai dalam rangka menentukan kebijakan dan strategi agar kinerja keuangan daerah lebih baik lagi dimasa yang akan datang

### b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan kontribusi sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

### c. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan analisis tentang kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah selama periode yang ditemukan

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian “Lazyra Ks yang berjudul Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Pemerintahan Kota Binjai Tahun 2013/2017.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada :

**Tabel 1.2**  
**Originalitas Penelitian**

No.	Keterangan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Lokasi Penelitian	Kota Medan	Kota Binjai
2.	Tahun Penelitian	2016	2018
3.	Variabel yang diteliti	Penelitian ini menggunakan lima rasio keuangan daerah	Penelitian ini menggunakan tiga rasio keuangan daerah

*Sumber : Penulis, 2019*

1. **Variabel Penelitian** : Penelitian terdahulu menggunakan 5 rasio keuangan sedangkan penelitian ini menggunakan tiga rasio keuangan
2. **Waktu Penelitian** : Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2016 sedangkan penelitian ini tahun 2018.
3. **Data Penelitian** : penelitian terdahulu menggunakan data tahun 2011-2015 sedangkan penelitian ini menggunakan tahun data 2013-2017
4. **Lokasi Penelitian** : Lokasi penelitian terdahulu di Kota Medan sedangkan penelitian ini di Pemerintahan Kota Binjai.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Devinisi Kinerja Keuangan Daerah**

Keuangan daerah merupakan suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan dari suatu daerah provinsi, kabupaten dan kota yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Abdul Halim, 2012 : 35). Adanya tuntutan kinerja keuangan oleh masyarakat mengharuskan pemerintah daerah memberikan gambaran tentang kinerja pemerintahnya. Penilaian kinerja harus memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dan laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah daerah perlu disampaikan tepat waktu dan disusun mengikuti standart akuntansi pemerintah.

##### **2. Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah**

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Pengukuran kinerja untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Ukuran kinerja digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan dan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik serta memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardismo, 2009 : 121).

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu priode dibandingkan dengan priode sebelumnya

sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Tujuan dan manfaat pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah suatu prestasi dalam pelaksanaan program dapat diukur melalui dorongan dalam pencapaian prestasi tersebut. Pengukuran dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus dan untuk mencapai masa yang akan datang. Salah satu alat analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang ditetapkan dan dilaksanakan. Adapun jenis-jenis pengukuran rasio keuangan daerah sebagai berikut :

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian dalam arti mampu untuk berdiri sendiri tanpa bantuan eksternal dan mampu untuk bertanggungjawab. Didalam organisasi perlu melakukan pengukuran, pengukuran tersebut dilakukan dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah mampu menunjukkan dalam membiayai diri sendiri dengan berjalannya kegiatan pemerintah berupa pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi merupakan pendapatan bagi pemerintah. Kemandirian keuangan daerah di tunjukkan dengan besar kecilnya pendapatan asli daerah di bandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan maka semakin tinggi pula kemandirian keuangan daerah (Abdul Halim, 2012 : 5). Untuk melihat kreteria pola hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah sebagai berikut.



$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak luar semakin rendah. Semakin tingginya rasio keuangan daerah maka menunjukkan semakin tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah.

**Tabel 2.1**  
**Tabel Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	>25 – 50	Konsultatif
Sedang	> 50 – 75	Partisipatif
Tinggi	> 75 – 100	Delegatif

*Sumber : Abdul Halim, (2013)*

- 1) Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah ( daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu berupa campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena dianggap sedikit lebih mampu menjalankan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena benar-benar mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

b. Rasio Efektivitas PAD

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dan *output*. *Outcome* merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat sedangkan *Output* merupakan hasil yang dicapai dari suatu program aktivitas dan kebijakan (Mahsun, 2014 : 191). Efektivitas berhubungan dengan suatu derajat keberhasilan dalam menjalankan oprasi sektor publik sehingga kegiatan dapat dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan dalam menyediakan pelayanan masyarakat yang ditetapkan berdasarkan sasaran sebelumnya. Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Adapun rumus menghitung Rasio Efektivitas PAD adalah sebagai berikut :

$$\text{RasioEfektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan diatas diukur dengan menggunakan kreteria penilaian kinerja keuangan.

**Tabel 2.2**  
**Tabel Efektivitas PAD**

Presentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Target Penerimaan Pajak Daerah	Efisiensi Pajak Daerah
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

*Sumber : Mahmudi, (2010 : 143)*

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi berhubungan dengan metode operasi. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisiensi apabila suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dan *input*. *Output* merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dan *input* merupakan realisasi dari penerimaan daerah (Mahsun, 2014:189).

Rasio efisiensi berupa tingkat pencapaian dalam pelaksanaan dan kegiatan dari suatu prestasi yang telah dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam satuan persen. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien dan begitu juga sebaliknya. Rasio efisiensi diukur dengan:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui hasil dari perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja daerah dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penelitian kinerja keuangan dapat ditentukan.

**Tabel 2.3**

**Kreteria Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah**

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% Keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80 %	Efisien
<60 %	Sangat Efisien

*Sumber : Abdul Halim, (2013)*

### 3. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja

Tujuan sistem pengukuran kinerja secara umum adalah (Mardismo, 2009:122) :

- a. Untuk mengomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *bottom up*).
- b. Untuk mengukur kinerja secara financial dan non-financial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.

### 4. Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan PertanggungJawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pemimpin Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara

Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasi yang isinya terdiri dari :

a. Pengelompokan kemampuan keuangan daerah untuk provinsi, diatur sebagai berikut :

(1) Di atas Rp. 1.500.000.000.000,00 ( satu trilyun lima ratus miliar rupiah) dikelompokan pada kemampuan keuangan daerah tinggi

1) Antara Rp. 60.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah) dikelompokan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan

2) Di bawah Rp. 600.000.000.000,00 ( enam ratus milyarrupiah) dikelompokan pada kemampuan rendah

b. Pengelompokan kemampuan keuangan daerah untuk kabupaten/kota, diatur sebagai berikut :

1) Di atas Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) dikelompokan pada kemampuan tinggi

2) Antara Rp. 200.000.000.000,000 ( dua ratus milyar rupiah) dikelompokan pada kemampuan sedang; dan

3) Di bawah Rp. 200.000.000.000,00 ( dua ratus milyar rupiah) dikelompokan pada kemampuan daerah sedang

Adapun perubahan kedua Pemerndagri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasi. Menjadi Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional pasal 5 yang isinya berupa :

a. Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah provinsi dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) di atas Rp. 4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Daerah tinggi;
- 2) Rp. 1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang dan;
- 3) Di bawah Rp. 1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

b. Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah kabupaten/kota dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi
- 2) Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- 3) Di bawah Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.

## **5. Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah terdiri atas pengurusan khusus. pengurusan ini berkaitan dengan APBD. Fungsi penyelenggaraan pemerintah

daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber penerimaan yang cukup kepada daerah yang sesuai dengan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Abdul Halim, 2012).

Pengelolaan keuangan daerah yaitu seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Wachid, 2014:2). Pendanaan penyelenggaraan pemerintah agar terlaksana secara efektif dan efisien dan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada pembangunan pemerintah, diatur sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka desentralisasi dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- b. Penyelenggaraan kewenangan pemerintah menjadi tanggungjawab bagi pemerintah pusat yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Keuangan daerah memberikan suatu gambaran statistik tentang Pengembangan Anggaran dan Realisasi, yang berupa penerimaan dan pengeluaran.

## **6. Asas – Asas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah adalah laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Nurlan Darise, 2009:37). Asas merupakan dasar hukum dalam suatu pembentukan

regulasi atau peraturan perundang-undang. Asas menerangkan sesuatu arah atau pun pedoman berupa kewajiban. Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan, secara spesifik asas umum pengelolaan keuangan daerah dapat diklasifikasikan dalam penyusunan APBD, dasar hukum, jangka waktu dan penyusunan pendapatan dan belanja. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 pengelolaan keuangan daerah dikaitkan dengan penyusunan APBD yaitu :

- a Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegritas yang diwujudkan dalam APBD dalam setiap tahun yang telah ditetapkan peraturan daerah.
- b Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
- c Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan kedalam APBD.
- d Penyelenggaran tugas Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaran pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah.

Asas umum APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara untuk



perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dalam peraturan daerah.

## **7. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, 2012 : 43).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam pencatatan suatu kejadian melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sehingga akan termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

Dalam prosedur sistem akuntansi pemerintah ditetapkan sebagai pelaporan dan akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) dan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD.

## **8. Ruang Lingkup Keuangan Daerah**

Menurut peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 2, ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan daerah merupakan suatu keseluruhan yang masuk ke kas daerah, tetapi tidak semua penerimaan merupakan pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih.
- d. Pengeluaran daerah merupakan uang yang dikeluarkan dari kas daerah dan belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

## **9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrument kebijakan utama bagi pemerintah daerah. Dimana anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan serta dalam perencanaan pembangunan, memotivasi para pegawai, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja sebagai alat bantu koordinasi bagi semua aktivitas bagi semua aktivitas diberbagai unit kerja ( Mardismo, 2012 :103).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu rencana kerja pemerintah yang berupa pendapatan, penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota dalam merangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dan uang dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam

peraturan perundang-undang yang dibuat peraturan daerah ( Badrudin 2012 : 97).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKPD). RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran untuk pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

APBD adalah suatu anggaran yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Abdul Halim, 2012 : 22) :

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraian yang terinci.
- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka
- d. Priode anggaran, biasanya satu tahun.

## 10. Kebijakan Penyusunan APBD

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sebagai berikut :

### a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD yang merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimanya. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar.

#### 1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Mardismo, 2011 : 1). Berdasarkan Pasal 1 dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah perolehan berdasarkan peraturan sesuai dengan perundang-undang yang berlaku. Sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

#### a) Pajak Daerah

Pajak atau iuran dari masyarakat kepada negara (bersifat memaksa) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut perundang – undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubung dalam menyelenggarakan pemerintah (P.J.A Andiani dalam Diana Sari, 2013 : 33). Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 menyatakan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah guna untuk kemakmuran rakyat.

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Mardismo, 2009: 14). Retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan bagian atas laba atas penyertaan modal milik usaha daerah maupun negara (Halim dan Kusufi, 2012 : 104). Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2018 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan

daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan ekonomi, sosial dan manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah.

d) Lain-lain PAD Yang Sah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah yang Sah, disediakan untuk mengantarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah yaitu :

- (1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan Jasa Giro
- (2) Pendapatan Bunga
- (3) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- (4) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai sumber dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah sesuai dengan penjelasan pada Pasal 23 Ayat 2 meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja

di gunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah. Berdasarkan Pemendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah terbagi atas 3 yaitu :

1) Belanja operasi

Belanja oprasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari pemerintah pusat atau daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja oprasi antara lain, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

2) Belanja modal

Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah yang akan menambah belanja bersifat rutin. Belanja modal terbagi atas belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja irigasi, jalan dan jaringan, belanja aset tetap lainnya.

3) Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak di perkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah untuk urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup :

- 1) SiLPA tahun anggaran sebelumnya :
- 2) Pencairan dana cadangan
- 3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Penerimaan pinjaman
- 5) Penerimaan kembali peminjaman

#### **11. Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

Adapun fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yaitu :

- a. Fungsi otorisasi, yang berarti anggaran daerah menjadi dasar dalam melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan, anggaran daerah menjadi pedoman bagaimana manajemen dalam merencanakan kegiatan pada yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan, dimana anggaran daerah untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi stabilisasi, anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.



## 12. Dasar Hukum Keuangan Daerah

Dalam rangka penataan pengelolaan keuangan negara/daerah diterbitkan berbagai peraturan perundang-undang. Peraturan perundang-undang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Daerah
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
- c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pendapatan Asli Daerah
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional .
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

## B. Peneliti Terdahulu

Penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Mapping Penelitian Sebelumnya**

No	Nama / Tahun	Judul	Model Analisis	Hasil Penelitian
1.	Mhd Ichwan Cahyadi (2012)	Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	Model Deskriptif	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berada di kriteria sangat kurang.
2.	Juliani Dora (2017)	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2014	Model Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi, rasio kemandirian keuangan daerah rendah dengan pola konsultatif, rasio

				<p>efektivitas pajak daerah sangat efisien, rasio efisiensi belanja operasi terhadap total belanja mendominasi alokasi belanja membandingkan rasio belanja modal terhadap total belanja, rasio pertumbuhan asli daerah, rasio pertumbuhan operasi dan rasio belanja modal mengalami pertumbuhan yang positif.</p>
3	Hony Adhiantoko (2013)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 – 2011)	Model Deskriptif	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora dilihat dari (1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan sangat kurang, karena rata-ratanya sebesar 6,57 % (2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pola hubungannya masih tergolong dalam pola hubungannya masih tergolong dalam pola hubungan instruktif karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 7,17 % (3) Rasio Efektivitas</p>

				<p>PAD efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Blora sudah efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 108,71% (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikatakan kurang efisien karena rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Blora sebesar 99,61% (5) Rasio Keserasian diketahui bahwa rata-rata belanja operasi daerah masih sangat tinggi yaitu 84,55% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 12,99% sehingga dapat dikatakan Pemerintah Daerah masih kurang memperhatikan pembangunan Daerah.</p>
4.	Lazyra Ks (2016)	Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan	Model Deskriptif	<p>Hasil penelitian menunjukkan kinerja pemerintah Daerah Kota Medan dengan menggunakan rasio keuangan daerah mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan daerah Pemerintah Daerah</p>

				<p>Kota Medan, dan meningkatnya Belanja Daerah bahkan melebihi dari yang di anggarkan oleh Pemerinyah Kota Medan , rasio kemandirian yang masih dibawah standar keuangan daerah terjadi dikarenakan pemerintah daerah tidak mampu dalam mencapai target untuk pendapatan daerah tersebut, untuk rasio efektivitas yang masih dibawah standar terjadi dikarenakan pemerintah daerah tidak mampu dalam mencapai target untuk pendapatan daerah tersebut, untuk rasio efesiensi yang berada diatas stadar terjadi dikarenakan besarnya belanja daerah melebihi dari target.</p>
--	--	--	--	--

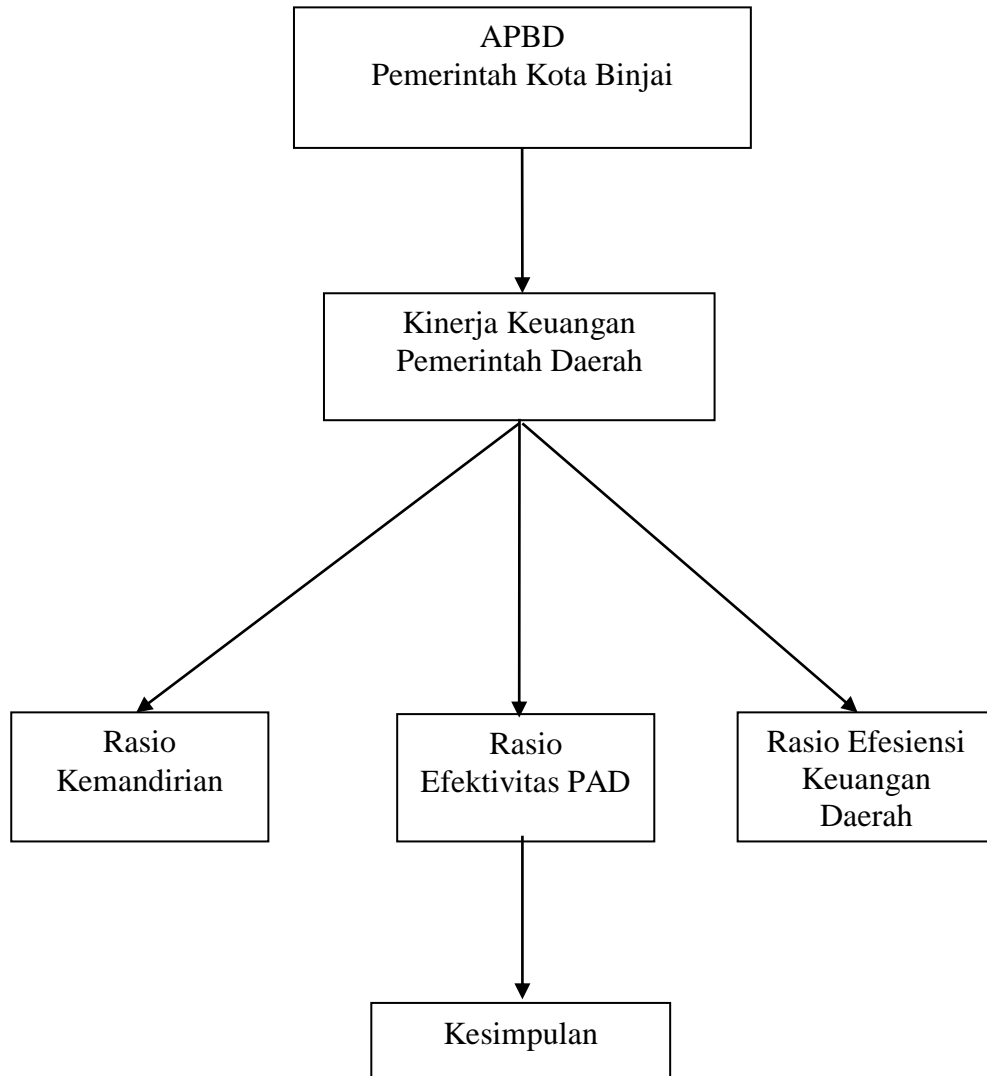
### C. Kerangka Konseptual

Menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kota Binjai adalah suatu proses penilaian dengan tingkat kemajuan dalam pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai dalam bidang keuangan dalam kurun waktu tertentu. Di bawah ini ada 3 macam rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari :

1. Rasio Kemandirian dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Pendapatan Transfer. Rasio ini menunjukkan semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak luar semakin sedikit. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka menunjukkan semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah.
2. Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang di rencanakan dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sesuai dengan potensi dari daerahnya tersebut. Rasio efektivitas dihitung dengan realisasi pendapatan dibagi dengan anggaran pendapatan. Jika rasio efektivitas semakin tinggi maka semakin baik kinerja pemerintah daerah tersebut.
3. Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut

diketahui bahwa kinerja pemerintah akan mendukung peningkatan dalam menajalankan otorisasi secara maksimal.

Bentuk Kerangka Konseptual Desriktif



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

*Sumber : Penulis, 2019*

**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek/penelitian ataupun hasil penelitian. Metode deskriptif ini sebagai metode yang berfungsi mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya (Sugiyono, 2012)

**B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai dan penelitian ini dilakukan mulai dari bulan November 2018 sampai Juli 2019, dengan format berikut :

**Tabel 3.1**  
**Schedule Proses Penelitian**

No	Aktivitas	Bulan																		
		Sep, 2018	Nov, 2018	Des, 2018	Jan, 2019	Feb, 2019	Aprl, 2019	Mei 2019	Juni 2019	Juli 2019										
1	Pengajuan Judul	■																		
2	Penulisan Proposal		■	■	■															
3	Seminar Proposal								■											
4	Perbaikan/ACC Proposal									■										
5	Riset									■	■	■								
6	Penyusunan Skripsi									■	■	■								
7	Bimbingan Skripsi												■	■	■	■	■			
8	Sidang Meja Hijau																			■

Sumber : Penulis, 2019



### C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dimana data ini berupa data yang dihitung berupa data Anggaran dan Realisasi Pendapatan Belanja Daerah Kota Binjai. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data skunder. Data skunder merupakan data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu laporan anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Binjai tahun 2013-2017.

### D. Definisi Operasional Variabel

Definisi oprasionalisasi untuk menjabarkan variabel-variabel yang timbul dari suatu penelitian kedalam indikator – indikator yang lebih terperinci. Berikut definisi variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Deskripsi	Indikator	Skala
Rasio Kemandirian	Rasio kemandirian menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. <i>Sumber : Abdul Halim (2012 :5)</i>	$\frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$ <i>Sumber : Abdul Halim (2012 : 5)</i>	Rasio
Rasio Efektivitas PAD	Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$ <i>Sumber : Mahsun (2010 : 191)</i>	Rasio

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	berdasarkan potensi riil daerah. <i>Sumber :Mahsun (2014 : 191</i>  Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima <i>Sumber : Mahsun (2014 : 189)</i>	$\frac{\text{RealisasiBelanjaDaerah}}{\text{PendapatanDaerah}} \times 100\%$ <i>Sumber : Mahsun (2014 : 189)</i>	Rasio
---------------------------------	---	---	-------

*Sumber : Penulis, 2019*

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan yang bersumber dari dokumen dan laporan dari hasil anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Daerah Pemerintah Kota Binjai Tahun 2013-2017 yang diperlukan oleh peneliti.

#### **F. Teknik Analisa Data**

Metode dalam analisis data ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif dimana metode ini digunakan untuk merumuskan perhatian masalah yang dihadapi. Dimana data tersebut dikumpulkan, disusun dan di analisis sehingga dapat memberikan informasi masalah yang ada. Dalam penelitian kuantitatif, analiss data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh

responden dan sumber data yang terkumpul (Sugiyono, 2012 ). Adapun teknik analisa data yang dapat dilakukan dengan beberapa tahap seperti berikut :

1. Mengumpulkan data penelitian berupa Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kota Binjai Tahun 2013-2017.
2. Menghitung rasio keuangan Perimerintah Kota Binjai.
3. Menghitung kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai dengan mengukur kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD dan efesiensi keuangan daerah.
4. Menganalisis dan membahas kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai dengan indikator yang sesuai dengan teori.
5. Menarik kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil Kota Binjai**

###### **a. Kondisi Geografis**

Secara geografis Kota Binjai merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara yang berjarak  $\pm 22$  Km ( $\pm 30$  menit perjalanan), bahkan batas terluar Kota Binjai dengan batas terluar Kota Medan hanya berjarak  $\pm 8$  km. Secara geografis, Kota Binjai berada pada  $3^{\circ} 31' 40'' - 34^{\circ} 2''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ} 27' 3'' - 98^{\circ} 32''$  Bujur Timur dan terletak 28 m di atas permukaan laut. Wilayah Kota Binjai seluas 90, 23 km<sup>2</sup> dikelilingi oleh Kabupaten Deli Serdang. Batas area disebelah Utara adalah Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Hampanan Perak Kabupaten Deli Serdang di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sei Binjai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.

Seperti halnya kota-kota lainnya di Indonesia Kota Binjai adalah daerah yang beriklim tropis dengan 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau biasanya ditandai dengan jumlah hari pada hujan tiap bulan terjadinya musim. Kota Binjai berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten

Langkat, serta berada Jalur Transportasi Utama yang menghubungkan Provinsi Sumatera dengan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) serta ke Objek Wisata Bukit Lawang Kabupaten Langkat (Binjai Dalam Angka, 2017)

**b. Pemerintahan Kota Binjai**

Kota Binjai sebagai salah satu Daerah Tingkat II di Provisni Sumatera Utara telah membenahi dirinya dengan melakukan pemekaran wilayahnya. Sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1986 wilayah Kota Daerah Kota Binjai telah diperluas menjadi 90,23 Km persegi dengan 5 wilayah Kecamatan yang terdiri dari 11 Desa dan 19 kelurahan. Setelah diadakan pemecahan Desa dan kelurahan tahun 1993 maka jumlah desa menjadi 17 dan kelurahan 20. Perubahan itu berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 146/2624/sk/1996 tanggal 7 Agustus 1996, 17 Desa menjadi Kelurahan (BPS Kota Binjai, 2017).

Pembagian wilayah Kecamatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Binjai Selatan
  - a) Kelurahan Tanah Merah
  - b) Kelurahan Binjai Estate
  - c) Kelurahan Tanah Seribu
  - d) Kelurahan Pujidadi
  - e) Kelurahan Rambung Dalam
  - f) Kelurahan Rambung Barat
  - g) Kelurahan Rambung Timur

- h) Kelurahan Bhakti Karya
- 2) Kecamatan Binjai Kota
- a) Kelurahan Berngam
  - b) Kelurahan Satria
  - c) Kelurahan Setia
  - d) Kelurahan Kartini
  - e) Kelurahan Tangsi
  - f) Kelurahan Binjai
  - g) Kelurahan Pekan Binjai
- 3) Kecamatan Binjai Timur
- a) Kelurahan Mencirim
  - b) Kelurahan Tunggorono
  - c) Kelurahan Timbang Langkat
  - d) Kelurahan Tanah Tinggi
  - e) Kelurahan Sumber Muliorejo
  - f) Kelurahan Datara Tinggi
  - g) Kelurahan Sumber Karya
- 4) Kecamatan Binjai Utara
- a) Kelurahan Pahlawan
  - b) Kelurahan Jatinegara
  - c) Kelurahan Nangka
  - d) Kelurahan Damai
  - e) Kelurahan Kebun Lada
  - f) Kelurahan Cengkeh Turi

g) Kelurahan Jati Makmur

h) Kelurahan Jati Utomo

5) Kecamatan Binjai Barat

a) Kelurahan Bandar Senembah

b) Kelurahan Limau Mungkur

c) Kelurahan Limau Sundai

d) Kelurahan Paya Roba

e) Kelurahan Suka Maju

f) Kelurahan Suka Ramai

**c. Visi dan Misi Pemerintah Kota Binjai**

**1) Visi**

" Menuju Kota Binjai Idaman yang dinamis, berdaya saing dan nyaman dalam kebersamaan"

**2) Misi**

a) Membangun Kota Binjai Idaman yang dinamis dan Berdaya Saing

b) Membangun dan Meningkatkan Insfrastruktur Perekonomian

c) Membangun Masyarakat Sehat, Cerdas dan Berbudaya

d) Peningkatan Pelayanan Publik yang berkualitas

e) Membangun dan Membina Kerukunan Hidup Beragama

**d. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Binjai**

Adapun organisasi perangkat daerah Kota Binjai yang telah dibentuk berdasarkan peraturan dan ketentuan diatas terdiri dari :

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Kota Binjai dan Staf Ahli Walikota Binjai.

## 1) Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota. Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana, pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi dan Sekretariat Daerah ini mencakup :

- a) Melakukan pengkordinasian perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah;
- b) Menyelenggarakan administrasi pemerintah;
- c) Melaksanakan pembinaan pembangunan;
- d) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan
- e) Melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada instansi vertikal;
- f) Melaksanakan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum yang menyangkut tugas pokok pemerintahan di daerah dan penyusunan anggaran;
- g) Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
- h) Mengelola sumber daya aparatur keuangan prasarana dan sarana pemerintahan daerah tersebut;



- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Organisasi Sekretariat Daerah Kota Binjai terdiri dari :

(1) Asisten Pemerintahan Kota Binjai

- (a) Bagian Pemerintahan;
- (b) Bagian Agraria Kerjasama;
- (c) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- (d) Bagian Hukum dan Perundang-undangan;

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:

- (a) Bagian Perekonomian;
- (b) Bagian Pembangunan;
- (c) Bagian Penanaman Modal ;

(3) Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

- (a) Bagian Umum dan Protokol
- (b) Bagian Organisasi dan Tatalaksana
- (c) Bagian Hubungan Masyarakat
- (d) Bagian Pengelolaan Data Elektronik (PDE) dan Telekomunikasi ( Santel)

(4) Sekretariat DPRD Kota Binjai, terdiri dari :

- (a) Bagian Umum;
- (b) Bagian Keuangan;
- (c) Bagian Risalah dan Persidangan;
- (d) Bagian Hukum dan perundang-undangan.

- 2) Staf Ahli Walikota Binjai, terdiri dari :
- a ) Bidang Hukum dan Politik
  - b) Bidang Pemerintahan;
  - c) Bidang Pembangunan;
  - d) Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
  - e) Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- 3) Dinas – Dinas Daerah Kota Binjai, terdiri dari :
- a) Dinas Pendidikan dan Pengajaran;
  - b) Dinas Pemuda dan Olah Raga;
  - c) Dinas Kesehatan;
  - d) Dinas Kesehatan;
  - e) Dinas Sosial;
  - f) Dinas Tenaga Kerja;
  - g) Dinas Perhubungan;
  - f) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - g) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  - h) Dinas Pekerjaan Um
  - i) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - j) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
  - k) Dinas Pertanian
  - l) Dinas Kebersihan;
  - m) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- 4) Lembaga Teknis Kota Binjai, terdiri dari :
  - a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b) Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Linmas;
  - c) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
  - d) Badan Keluarga Berencana (KB) dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
  - e) Badan Pendidikan dan Pelatihan;
  - f) Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
  - g) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
  - h) Kantor Pemberdayaan Perempuan;
  - i) Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
  - j) Kantor Penelitian dan Pengembangan;
  - k) Badan Kepegawaian Daerah;
  - l) Inspektorat Kota;
  - m) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham;
  - n) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - o) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
- 5) Kecamatan Pemerintah Kota Binjai, terdiri dari :
  - a) Kecamatan Binjai Kota;
  - b) Kecamatan Binjai Utara;
  - c) Kecamatan Binjai Timur;
  - d) Kecamatan Binjai Selatan
  - e) Kecamatan Binjai Barat

- 6) Kelurahan Pemerintah Kota Binjai, terdiri dari 37 Kelurahan.
- 7) Badan Narkotika Kota Binjai, (Binjai Dalam Angka, 2019)



**Gambar 4.1**

**Peta Kota Binjai**

*Sumber : Binjai Dalam Angka, 2017*

## 2. Analisa Data

## DATA KHUSUS

Tabel 4.1

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Untuk Tahun Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2013**

Uraian	Anggaran 2013	Realisasi 2013	(%)	Realisasi 2012
<b>PENDAPATAN</b>	<b>777.139.382.117,00</b>	<b>711.568.038.362,01</b>	<b>91,56</b>	<b>689.107.085.691,25</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>55.753.400.094,00</b>	<b>49.196.058.726,01</b>	<b>88,24</b>	<b>48.178.078.782,50</b>
Pendapatan Pajak Daerah	24.424.358.000,00	25.579.357.503,56	104,73	32.801.101.182,50
Pendapatan Retribusi Daerah	23.129.042.394,00	14.640.339.129,64	63,3	6.854.204.861,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan- Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.800.000.000,00	2.981.700.099,00	106,49	13.965.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.400.000.000,00	5.994.661.930,81	111,01	8.508.807.739,00
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>628.456.541.723,00</b>		<b>97,44</b>	<b>552.755.195.445,75</b>
Transfer Pemerintah Pusat –				
Dana Perimbangan	540.304.364.126,00	612.353.316.836,00	98,24	482.077.837.724,00
Dana Bagi Hasil	29.809.847.112,00	530.808.739.362,00	108,74	40.093.351.968,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	2.284.050.014,00	32.414.156.226,00	51,89	1.241.299.756,00
Dana Alokasi Umum	477.553.537.000,00	1.185.288.136,00	100,00	416.965.216.000,00
Dana Alokasi Khusus	30.656.930.000,00	477.553.537.000,00	64,12	23.777.970.000,00
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	74.039.384.000,00	19.655.758.000,00	100,00	60.091.589.729,25
Dana Otonomi Khusus	0,00	74.039.384.000,00	0,00	4.401.573.729,75
Dana Penyesuaian	74.039.384.000,00	0,00	100,00	55.690.016.000,00
Trasnfer Pemerintah Pusat	14.122.793.597,00	74.039.384.000,00	53,18	10.585.767.992,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	14.122.793.597,00	7.505.193.474,00	53,18	10.585.767.992,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>92.929.440.000,00</b>	<b>7.505.193.474,00</b>	<b>53,82</b>	<b>10.585.767.992,00</b>
Pendapatan Lainnya	92.929.440.000,00	50.018.662.800,00	53,82	10.585.767.992,00
<b>BELANJA</b>	<b>863.361.971.139,89</b>	<b>702.167.562.649,00</b>	<b>81,33</b>	<b>650.087.241.200,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>654.486.480.388,89</b>	<b>568.964.879.524,00</b>	<b>86,93</b>	<b>491.878.213.097,00</b>
Belanja Pegawai	472.703.123.158,89	428.872.699.388,00	90,73	6.310.000.000,00
Belanja Barang	169.593.470.030,00	133.090.894.311,56	78,48	95.280.700.249,00
Belanja Hibah	9.495.487.200,00	5.101.940.500,00	53,73	0,00
Belanja Bantuan Sosial	2.694.400.000,00	1.899.345.325,00	70,49	0,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>208.775.490.751,00</b>	<b>133.102.683.124,70</b>	<b>63,75</b>	<b>158.209.028.103,00</b>
Belanja Tanah	191.500.000,00	142.600.000,00	74,46	6.310.000.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	69.622.503.660,00	58.006.494.045,00	83,32	59.502.431.021,00
Belanja Bangunan dan Gedung	67.165.604.500,00	17.985.628.850,00	26,78	24.572.247.900,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	71.167.782.591,00	56.798.582.929,70	79,32	9.835.465.042,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	188.100.000,00	169.377.300,00	90,05	9.835.465.042,00
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00</b>
Belanja Tak Terduga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(86.22.589.022,89)</b>	<b>9.400.475.712,75</b>	<b>95.623.064.735,64</b>	<b>(10,90)</b>

**Tabel 4.2**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2014 dan 2013**

Uraian	Anggaran 2014	Realisasi 2014	%	Realisasi 2013
<b>PENDAPATAN</b>	<b>825.842.666.546,33</b>	<b>804.091.375.966,10</b>	<b>96,77</b>	<b>711.568.038.362,01</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>82.902.282.690,00</b>	<b>71.967.137.635,10</b>	<b>80,85</b>	<b>49.172.643.726,01</b>
Pendapatan Pajak Daerah	29.869.423.800,00	28.682.984.630,50	96,03	25.579.357.503
Pendapatan Retribusi Daerah	44.670.960.447,00	33.757.088.119,00	64,17	14.616.924.192,64
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.861.898.443,00	1.867.893.443,00	100,32	2.981.700.099,00
Lain-Lain PAD Yang Sah	6.500.000.000,00	7.659.166.442,60	120,09	5.994.661.930,81
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>695.409.330.233,33</b>	<b>717.043.184.702.</b>	<b>103,00</b>	<b>612.353.316.836,00</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan</b>	<b>593.261.608.116,00</b>	<b>585.699.016.088,00</b>	<b>98,73</b>	<b>612.353.316.836,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak	33.373.650.102,00	25.037.450.594,00	75,02	32.414.156.226,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	2.284.050.014,00	3.057.657.494,00	133,87	1.185.288.136,00
Dana Alokasi Umum	526.069.678.000,00	526.069.678.000,00	100,00	477.553.537.000,00
Dana Alokasi Khusus	31.534.230.000,00	31.534.230.000,00	100,00	19.655.758.000,00
<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>75.848.824.000,00</b>	<b>104.611.923.000,00</b>	<b>137,92</b>	<b>74.039.384.000,00</b>
Dana Penyesuaian	75.848.824.000,00	104.611.932.000,00	137,92	74.039.384.000,00
<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>26.298.898.117,33</b>	<b>26.732.236.620,00</b>	<b>101,65</b>	<b>7.505.193.474,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	2,629.889.817,33	26.728.557.120,00	101,63	7.505.193.474,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	3.679.500,00	100,00	0,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>47.531.053.623,00</b>	<b>15.081.053.623,00</b>	<b>31,73</b>	<b>50.018.662.800,00</b>
Pendapatan Lainnya	47.531.053.623,00	15.081.053.623,00	31,73	50.018.662.800,00
<b>BELANJA</b>	<b>918.030.764.513,97</b>	<b>804.308.312.949,00</b>	<b>87,34</b>	<b>702.167.562.649,26</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>717.162.858.719,97</b>	<b>651.023.466.787,00</b>	<b>90,41</b>	<b>568.964.879.524,55</b>
Belanja Pegawai	487.368.424.264.513,97	467.425.278.060,00	95,90	428.858.879.524,26
Belanja Barang	207.688.424.264,97	166.663.786.613,00	80,20	133.104.843.311,56
Belanja Hibah	18.353.888,00,00	14.559.018.331,00	79,84	5.101.940.500,00
Belanja Bantuan Sosial	3.751.350.000,00	2.375.384.162,00	63,37	1.899.345.325,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.367.905.794,00</b>	<b>153.284.846.162,00</b>	<b>76,50</b>	<b>133.102.683.124,70</b>
Belanja Tanah	120.000.000,00	96.000.000,00	80,00	142.600.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	40.954.724.299,00	28.728.164.350,00	70,15	58.006.494.045,00
Belanja Bangunan dan Gedung	54.409.687.800,00	31.720.098.966,00	58,30	17.985.628.850,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	101.247.687.970,00	89.546.634.275,00	88,44	56.789.582.929,70
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.635.585.725,00	3.193.948.571,00	87,85	169.377.300,00
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00</b>
Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00

**Tabel 4.3**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2015 dan 2014**

Uraian	Anggaran 2015	Realisasi 2015	%	Realisasi 2014
<b>PENDAPATAN</b>	<b>906.257.726.285,00</b>	<b>843.711.784.005,00</b>	<b>93,10</b>	<b>804.091.375.966,00</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>91.027.835.669,00</b>	<b>78.327.792.810,58</b>	<b>86,85</b>	<b>71.967.137.635,10</b>
Pendapatan Pajak Daerah	27.869.423.800,00	30.882.624.012,34	110,81	28.628.984.630,50
Pendapatan Retribusi Daerah	54.796.513.426,00	28.835.847.161,00	52,62	33.757.088.119,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.861.898.443,00	3.102.955.937,00	166,66	1.867.898.443,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6.500.000.000,00	15.506.365.700,24	238,56	7.659.166.442,60
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>815.229.890.616,00</b>	<b>604.168.845.881,00</b>	<b>93,89</b>	<b>585.699.016.088,00</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>618.107.377.116,00</b>	<b>604.168.845.881,00</b>	<b>97,74</b>	<b>585.699.016.088,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak	33.373.650.102,00	19.563.488.268,00	58,62	25.037.450.594,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	2.284.050.014,00	2.154.470.613,00	94,33	3.057.657.494,00
Dana Alokasi Umum	541.895.577.000,00	541.895.577.000,00	100,00	526.069.678.000,00
Dana Alokasi Khusus	40.554.100.000,00	40.555.310.000,00	100,00	31.534.230.000,00
<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>109.249.204.000,00</b>	<b>86.084.163.000,00</b>	<b>78,80</b>	<b>104.611.932.000,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	44.183.469.600,00	44.786.821.934,00	101,34	26.728.557.120,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>43.689.839.900,00</b>	<b>30.344.160.380,00</b>	<b>69,45</b>	<b>15.081.053.623,00</b>
Bantuan Keuangan Provinsi	43.689.839.900,00	30.344.160.380,00	69,45	15.081.053.623,00
<b>BELANJA</b>	<b>998.507.409.034,74</b>	<b>884.622.896.746,00</b>	<b>88,59</b>	<b>804.308.312.949,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>791.674.762.457,27</b>	<b>709.650.820.019,00</b>	<b>89,64</b>	<b>651.023.466.787,00</b>
Belanja Pegawai	496.222.298.206,27	459.105.535.656,00	92,52	467.425.278.060,00
Belanja Barang	254.937.240.051,00	213.660.500.163,00	83,81	166.663.786.613,00
Belanja Subsidi	263.734.200,00	263.734.200,00	100,00	0,00
Belanja Hibah	30.896.780.000,00	29.486.780.000,00	95,26	14.559.018.331,00
Belanja Bantuan Sosial	9.354.710.000,00	7.134.270.000,00	76,26	2.375.383.783,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>206.332.646.577,00</b>	<b>174.972.076.727,00</b>	<b>84,80</b>	<b>153.284.846.162,00</b>
Belanja Tanah	4.081.880.000,00	81.275.000,00	1,99	96.000.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	26.600.531.735,00	20.808.228.064,00	78,22	28.728.164.350,00
Belanja Bangunan dan Gedung	47.399.171.142,00	41.854.198.337,00	88,30	31.720.098.966,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	124.146.601.700,00	108.231.483.276,00	87,18	89.546.634.275,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.104.462.000,00	3.996.892.050,00	97,38	3.193.948.571,00
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>588.739.725,00</b>	<b>588.720.825,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	588.739.725,00	588.720.825,00	100,00	0,00
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(92.383.422.474,74)</b>	<b>(41.499.833.565,42)</b>	<b>44,70</b>	<b>(216.936.982,90)</b>



**Tabel 4.4**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016 dan 2015**

Uraian	Anggaran (2016)	Realisasi (206)	%	Realisasi 2015
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.048.464.949.879,00</b>	<b>964.637.550.866,42</b>	<b>92,00</b>	<b>843.711.784.005,58</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>93.605.157.050,00</b>	<b>97.339.497.584,36</b>	<b>98,72</b>	<b>78.327.792.810,58</b>
Pendapatan Pajak Daerah	33.564.821.500,00	34.720.261.530,56	103,44	<b>30.882.624.012,34</b>
Pendapatan Retribusi Daerah	7.399.577.376,00	3.234.448.564,00	59,26	28.835.847.161,00
Pendapatan Hasil Kekayaan Yang Sah	3.100.000.000,00	3.234.446.564,00	104,34	3.102.955.937,00
Lain-Lain PAD Yang Sah	54.540.758.174,00	54.999.835.168,80	100,84	15.506.365.700,24
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>900.621.340.766,00</b>	<b>818.059.491.533</b>	<b>90,83</b>	<b>765.383.991.195,00</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	800.621.340.766,00	747.927.480.220,00	93,38	604.168.845.881,00
Bagi Hasil Pajak	21.616.548.000,00	30.240.688.718,00	139,90	19.563.488.268,00
Bagi Hasil Bukan Pajak	2.765.175.158,00	1.727.075.207,00	70,2	2.154.470.613,00
Dana Alokasi Umum	574.469.158.000,00	574.469.158.000,00	100,00	541.895.577.000,00
Dana Alokasi Khusus	202.063.741.000,00	141.490.578.295,00	70,00	40.555.310.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	0,00	0,00	86.084.163.000,00
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	86.084.163.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	56.016.878.708,00	61.312.899.913,00	109,45	44.786.821.934,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	56.016.878.708,00	61.312.899.913,00	109,15	44.786.821.934,00
Bantuan Keuangan	43.689.839.900,00	8.819.111.400,00	20,19	30.344.160.380,00
Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi Lainnya	43.689.839.900,00	8.819.111.400,00	20,19	30.344.160.380,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>49.238.452.063,42</b>	<b>49.238.452.063,42</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Pendapatan Hibah	49.238.452.063,42	49.238.452.063,42	100,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	109.685,64	0,00	0,00
<b>BELANJA</b>	<b>1.046.968.117.493,32</b>	<b>945.078.606.296,00</b>	<b>90,27</b>	<b>884.622.896.746,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>825.249.967.313,32</b>	<b>741.550.724.698,00</b>	<b>90,61</b>	<b>709.650.820.019,00</b>
Belanja Pegawai	537.763.076.215,90	242.493.075.755,00	88,18	459.105.535.656,00
Belanja Barang dan Jasa	275.004.866.897,42	242.493.075.755,00	88,18	213.660.500.163,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	263.734.200,00	263.734.200,00	100,00	263.734.200,00
Belanja Hibah	10.960.590.000,00	10.291.782.000,00	93,90	29486.780.000,00
Belanja Bantuan Sosial	1.257.700.000,00	1.227.700.000,00	97,61	7.134.270.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>220.618.150.180,00</b>	<b>202.943.191.598,00</b>	<b>91,99</b>	<b>174.972.076.727,00</b>
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	174.972.076.727,00
Belanja Peralatan dan Mesin	45.737.008.310,00	38.968.334.713,00	85,20	20.808.228.064,00
Belanja Gedung dan Bangunan	22.612.558.500,00	21.584.856.400,00	95,46	41.854.198.337,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	144.729.505.870,00	138.585.930.530,00	95,76	108.231.483.276,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	7.539.077.500,00	3.804.089.955,00	50,46	3.996.892.050,00
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>1.100.000.000,00</b>	<b>584.690.000,00</b>	<b>53,15</b>	<b>0,00</b>
Belanja Tak Terduga	1.100.000.000,00	584.690.000,00	53,15	0,00
<b>TRANSFER</b>	<b>588.739.725,00</b>	<b>487.667.250,00</b>	<b>82,83</b>	<b>588.720.825,00</b>
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>588.739.725,00</b>	<b>487.667.250,00</b>	<b>82,83</b>	<b>588.720.825,00</b>
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	588.739.725,00	487.667.250,00	82,83	588.720.825,00
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>908.092.661,10</b>	<b>19.071.277.320,42</b>	<b>2.100,15</b>	<b>(41.499.833.565,42)</b>

**Tabel 4.5**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 Dan 2016**

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
<b>PENDAPATAN</b>	<b>964.903.163.076,00</b>	<b>879.551.758.424,48</b>	<b>91,15</b>	<b>964.637.550.866,42</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>170.357.041.265,33</b>	<b>139.217.621.697,48</b>	<b>81,72</b>	<b>97.339.497.584,36</b>
Pendapatan Pajak Daerah	45.156.276.875,00	45.555.502.540,38	100,88	34.720.281.530,56
Pendapatan Retribusi Daerah	7.263.695.738,38	4.907.246.694,00	67,56	4.384.932.321,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.212.978.767,00	3.385.642.489,00	80,36	3.234.448.564,00
Lain-Lain PAD Yang Sah	113.724.089.885,00	85.369.229.974,10	75,07	54.999.835.168,80
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>787.546.121.810,62</b>	<b>733.334.136.727,00</b>	<b>93,12</b>	<b>818.059.491.533,00</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	718.314.870.000,00	689.450.970.673,00	95,98	747.927.480.220,00
Bagi Hasil Pajak	21.447.221.000,00	23.399.166.673,00	109,10	30.240.668.718,00
Bagi Hasil Bukan Pajak	2.082.156.000,00	920.628.036,00	44,22	1.727.075.207,00
Dana Alokasi Umum	574.469.158.000,00	564.377.582.000,00	98,24	574.469.158.000,00
Dana Alokasi Khusus	120.316.335.000,00	100.753.593.803,00	83,74	141.490.578.295,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	69.231.251.810,62	43.883.166.054,00	63,39	61.312.889.913,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	69.231.251.810,62	43.883.166.054,00	63,39	61.312.889.913,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	8.819.111.400,00
Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	0,0	0,00	0,00	8.819.111.400,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>7.000.000.000,00</b>	<b>7.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>49.238.561.749,06</b>
Pendapatan Hibah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	49.238.561.749,06
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	109.685,64
<b>BELANJA</b>	<b>978.587.608.010,32</b>	<b>849.025.483.683,96</b>	<b>86,76</b>	<b>945.078.606.296,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>770.309.567.229,32</b>	<b>694.158.131.070,00</b>	<b>90,11</b>	<b>741.550.724.698,00</b>
Belanja Pegawai	456.960.174.793,32	426.641.783.277,00	93,37	242.493.075.755,00
Belanja Barang dan Jasa	304.674.068.236,00	262.073.195.411,00	86,02	242.493.075.755,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	263.734.200,00	263.734.200,00	100,00	263.734.200,00
Belanja Hibah	8.411.590.000,00	5.179.418.182,00	61,57	10.297.782.000,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	1.227.700.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>207.178.040.781,00</b>	<b>154.059.962.293,96</b>	<b>74,36</b>	<b>202.943.191.598,00</b>
Belanja Tanah	10.742.000.000,00	144.010.600,00	1,37	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	61.561.429.945,00	45.010.243.770,96	73,11	38.968.334.713,00
Belanja Gedung dan Bangunan	36.635.963.816,00	14.764.823.024,00	40,30	21.584.856.400,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	91.291.943.020,00	80.522.634.759,00	88,20	138.585.930.530,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	6.946.704.000,00	13.618.250.140,00	196,04	3.804.069.955,00
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>1.100.000.000,00</b>	<b>807.390.320,00</b>	<b>73,40</b>	<b>584.690.000,00</b>
Belanja Tak Terduga	1.100.000.000,00	807.390.320,00	73,40	584.690.000,00
<b>TRANSFER</b>	<b>588.739.725,00</b>	<b>588.720.725,00</b>	<b>100,00</b>	<b>487.667.250,00</b>
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>588.739.725,00</b>	<b>588.720.825,00</b>	<b>100,00</b>	<b>487.637.250,00</b>
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	588.739.725,00	588.720.825,00	100,00	487.637.250,00
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(14.237.184.659,32)</b>	<b>29.927.553.915,52</b>	<b>(209,75)</b>	<b>19.071.277.320,42</b>

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Binjai dalam penelitian ini adalah suatu proses penelitian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pemerintah Kota Binjai untuk kurun waktu 2013-2017. Rasio digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Binjai yang didapat dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Binjai. Dari data tersebut nantinya diketahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Binjai. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah :

#### **a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bagaimana tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai pemerintah itu sendiri tanpa bantuan pihak luar, dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang telah membayar retribusi dan pajak sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Trasfer}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{49.196.058.726}{612.353.316.836} \times 100\% \\ &= 8,03\% \end{aligned}$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{71.967.137.635}{717.043.184.708,00} \times 100$$

$$= 10,03\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{78.327.792.810}{765.383.991.195} \times 100\%$$

$$= 10,2\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{97.339.497.584}{818.059.491.533} \times 100\%$$

$$= 11,8\%$$

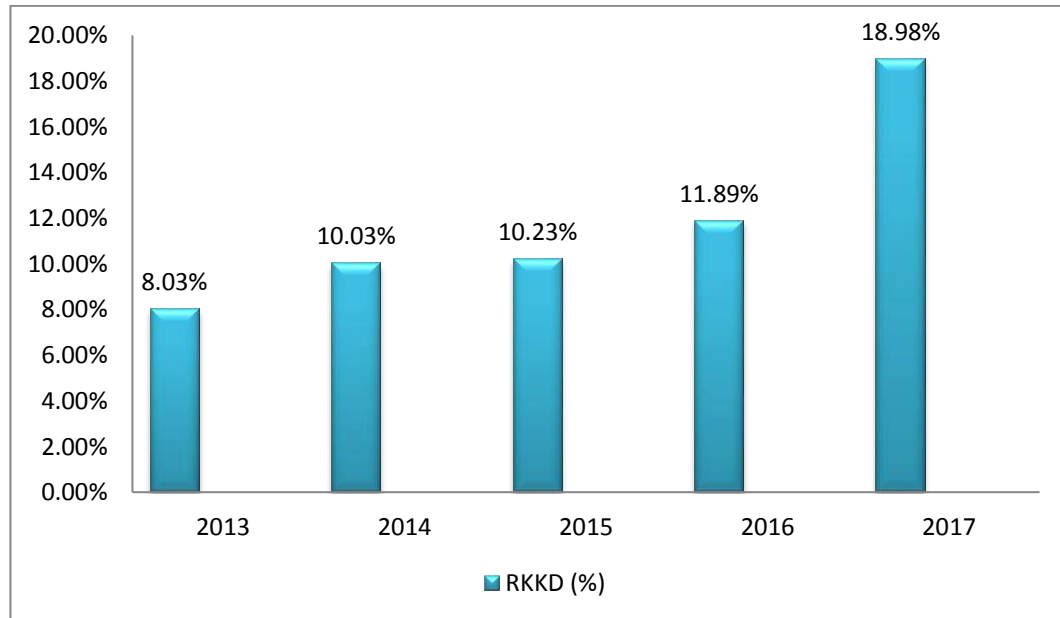
$$\text{Tahun 2017} = \frac{139.217.621.679}{733.334.136.727} \times 100\%$$

$$= 18,9\%$$

**Tabel 4.6**

**Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Binjai  
Tahun Anggaran 2013-2017**

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer	RKKD (%)	Pola Hubungan
2013	49.196.058.726,01	612.353.316.836,00	8,03	Instruktif
2014	71.967.137.635,10	717.043.184.708,00	10,03	Instruktif
2015	78.327.792.810,58	765.383.991.195,00	10,23	Instruktif
2016	97.339.497.584,36	818.059.491.533,00	11,89	Instruktif
2017	139.217.621.697,48	733.334.136.727,00	18,98	Instruktif



**Gambar Grafik 4.2**  
**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Berdasarkan dari data yang dikelola yaitu berasal dari data APBD Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2013-2017 yang diukur dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Untuk nilai terendah terdapat pada tahun 2013 sebesar 8,03%, untuk nilai tertinggi terdapat pada tahun 2017 sebesar 18,98%. Sementara untuk masing-masing nilai dari tahun tahun 2014 sebesar 10,3%, 2015 sebesar 10,23% dan 2016 sebesar 11,89%. Dapat dilihat bahwa pada setiap tahun nilai persentase meningkat, tetapi kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai masih sangat rendah karena berada di bawah nilai 25%. Sementara itu untuk mencapai nilai tertinggi harus berada di angka 100%.

#### **b. Rasio Efektivitas PAD**

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD direncanakan dibandingkan target yang

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{49.196.058.726}{55.753.400.394} \times 100 \\ &= 88,2\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{71.967.137.636}{82.902.282.690} \times 100\% \\ &= 86,8\% \end{aligned}$$

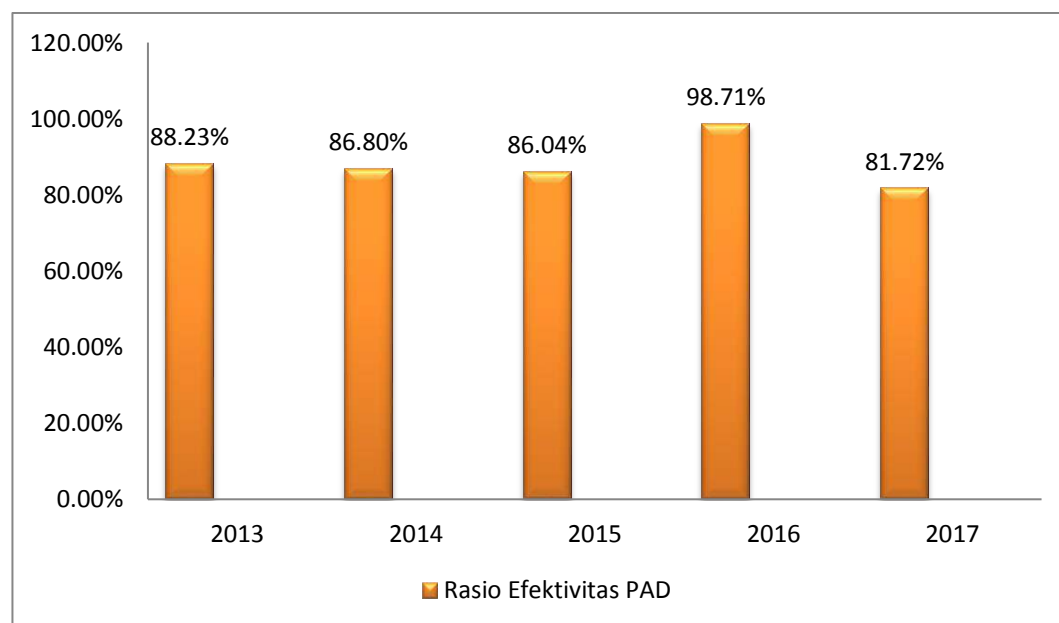
$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{78.327.792.811}{91.027.835.669} \times 100\% \\ &= 104\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{97.339.497.585}{98.605.157.050} \times 100\% \\ &= 98,7\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{139.217.621.698}{170.357.041.236} \times 100\% \\ &= 81,7\% \end{aligned}$$

**Tabel 4.7**  
**Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kota Binjai**  
**Tahun Anggaran 2013-2017**

Tahun Anggaran	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	REPAD (%)	Kreteria
2013	55.753.400.394,00	49.196.058.726,01	88,23	Kurang Efektif
2014	82.902.282,690,00	71.967.137.635,10	86,80	Kurang Efektif
2015	91.027.835.669,00	78.327.792.810,58	86.04	Kurang Efektif
2016	98.605.157.050,00	97.339.497.584,36	98.71	Cukup Efektif
2017	170.357.041.265,33	139.217.621.697,48	81.72	Kurang Efektif



**Gambar Grafik 4.3**

### Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Berdasarkan dari data yang di kelola yang berasal dari data APBD Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2013-2017 yang diukur dengan menggunakan Rasio Efektivitas PAD dari masing-masing pada tahun 2013, 2014, 2015 dan 2017 dinyatakan kurang efektif, karena berada di bawah nilai 100%.

Sementara berdasarkan dari perhitungan tahun 2013 nilainya sebesar 88,23%, tahun 2014 sebesar 86,80% 2015 sebesar 86,04% .Untuk tahun 2016 nilai presentase mengalami kenaikan sebesar 98,71% ini dikatakan cukup efektif karena nilai tersebut berada di antara 90%-99% dan untuk tahun 2017 nilai presentase mengalami penurunan menjadi 81,72%.

### c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{702.167.562.649,26}{711.568.038.362,01} \times 100\%$$

$$= 98,6\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{804.308.312.949,00}{804.091.375.966,00} \times 100\%$$

$$= 100,02\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{884.622.896.746,00}{843.711.784.005,58} \times 100\%$$

$$= 104\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{945.078.606.296,00}{964.637.550.866,42} \times 100\%$$

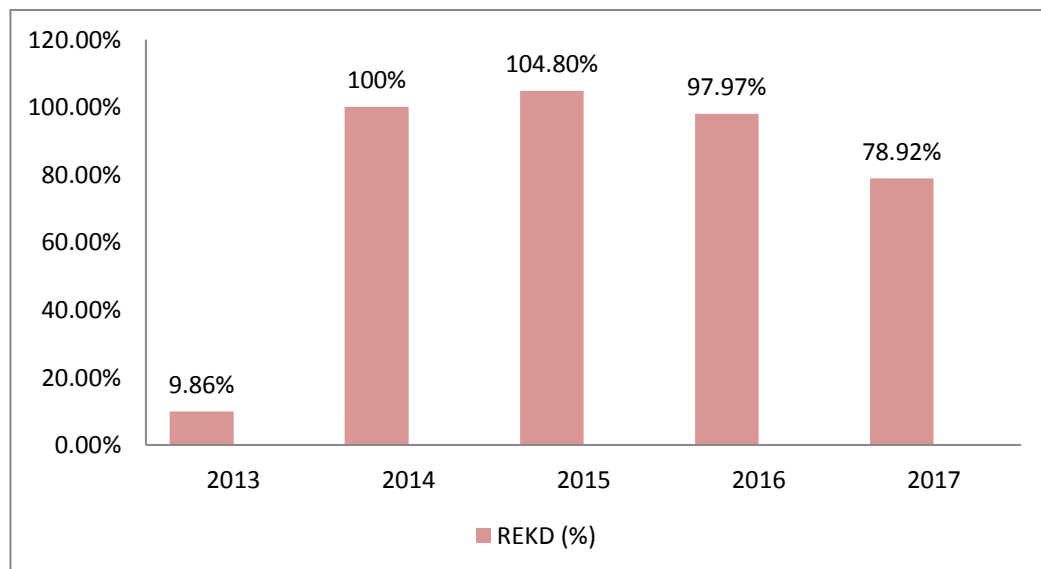
$$= 97,9\%$$



$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{694.158.131.070,00}{879.551.758.424,48} \\ &= 96,5\% \end{aligned}$$

**Tabel 4.8**  
**Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**  
**Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2013-2017**

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	REKD (%)	Kreteria
2013	702.167.562.649,26	711.568.038.362,01	9,86	Sangat Efisien
2014	804.308.312.949,00	804.091.375.966,10	100	Tidak Efisien
2015	884.622.896.746,00	843.711.784.005,58	104,8	Tidak Efisien
2016	945.078.606.296,00	964.637.550.866,42	97,97	Kurang Efisien
2017	694.158.131.070,00	879.551.758.424,48	78,92	Cukup Efisien



**Gambar Grafik 4.4**  
**Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**

Berdasarkan dari data yang di kelola dengan menggunakan data APBD Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2013-2017 yang diukur dengan menggunakan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah untuk tahun 2013 dengan nilai presentase sebesar 9,89% dikatakan sangat efisien, karena berada nilai tersebut berada di bawah 60% . Untuk masing-masing dari tahun 2014 dan 2015 dikatakan tidak efisien karena nilai tersebut berada di atas 100%. Untuk tahun 2014 nilai presentase sebesar 100% dan tahun 2015 sebesar 104,8%. Untuk tahun 2016 nilai persentase tersebut sebesar 97,97% dikatakan kurang efisien karena untuk nilai presentase tersebut berada di antara 80%-90% dan untuk tahun 2017 nilai persentasenya sebesar 78,92% dikatakan cukup efisien karena nilai tersebut berada di bawah 80%.

## B. Pembahasan

Berikut adalah rekapitulasi Rasio Keuangan Pemerintah Kota Binjai tahun anggaran 2013-2017 :

**Tabel 4.9**  
**Rekapitulasi Rasio Keuangan Daerah Pemerintah Kota Binjai**  
**Tahun Anggaran 2013/2017**

Tahun	Rasio Kemandirian		Rasio Efektivitas PAD		Rasio Efisiensi	
	Persen (%)	Kreteria	Persen (%)	Kreteria	Persen (%)	Kreteria
2013	8,03	Instruktif	88,23	Kurang Efektif	9,86	Sangat Efektif
2014	10,3	Instruktif	86,80	Kurang Efektif	100	Kurang Efisien
2015	10,23	Instruktif	86,80	Kurang Efektif	104,8	Tidak Efisien
2016	11,89	Instruktif	89,71	Cukup Efektif	97,97	Kurang Efisien
2017	18,98	Instruktif	81,72	Kurang Efektif	78,92	Kurang Efisien

(Sumber : penulis,2019)

## 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan dari hasil rekapitulasi dari tabel di atas yang dikelola melalui rasio keuangan daerah dengan data yang tersedia dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan tahun anggaran 2013-2017. Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dinyatakan kinerja Pemerintah Kota Binjai masih di kreteria sangat rendah dan termasuk pola instruktif. Instruktif artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan dalam penyelenggaraan/kegiatan pemerintah daerah (daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah). Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Binjai masih sangat tinggi ketergantungannya dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah itu sendiri. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi menjadi salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kota Binjai belum bisa diandalkan dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan. Semakin rendah rasio kemandirian keuangan daerah maka semakin tinggi bantuan dari pihak luar ( Abdul Halim, 2013)

Berdasarkan pertumbuhan kemandirian keuangan daerah yang kecenderungannya mengalami peningkatan, terlihat Pemerintah Kota Binjai menunjukkan upaya mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstren. Pemerintah daerah mendorong pertumbuhan PAD dengan mengandalkan pajak dan retribusi yang didasarkan oleh peraturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui pajak dan retribusi sebaiknya tidak hanya mengandalkan peraturan daerah semata, tetapi juga melibatkan peningkatan kualitas SDM, penyiapan

sarana/prasarana dasar dan pendukung, peraturan dan perundangan yang memperhatikan aspek ekonomi, efisiensi dan netralitas serta lembaga-lembaga yang terkait, termasuk desentralisasi kewenangan perijinan investasi, kebijakan pemberian fasilitas intensif kepada investor dan optimalisasi potensi perekonomian lokal sehingga bermanfaat kepada daerah.

Semakin rendah rasio kemandirian keuangan daerah maka semakin tinggi bantuan dari pihak luar ( Abdul Halim, 2013)

## **2. Rasio Efektivitas PAD**

Untuk tingkat efektivitas PAD Pemerintah Kota Binjai untuk Tahun 2013,2014,2015,2017 termasuk kriteria kurang efektif karena nilai presentase diantara 75%-89%. Pada tahun 2016 nilai presentasi dari rekapitulasi sebesar 97,97% ini dikatakan cukup efektif, walaupun ada nilai presentase yang menunjukkan cukup efektif namun dominan dari hasil perhitungan tersebut dominan kurang efektif dalam menjalankan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dikatakan efektif apabila ukuran suatu keberhasilan dalam melaksanakan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektif berhubungan dengan suatu derajat keberhasilan, artinya pemerintah daerah berhasil dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Semakin tinggi rasio efektivitas PAD maka semakin baik kinerja pemerintah. Jika semakin rendah rasio efektivitas PAD maka kinerja pemerintah dikatakan buruk (Mahmudi, 2010 : 143).

### **3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**

Untuk tingkat efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kota Binjai untuk tahun anggaran 2013-2017 cenderung nilai presentase naik turun. Pada tahun 2013 perhitungan menunjukkan bahwa rasio efisiensi dikatakan sangat efisien karena nilai persentasenya sebesar 9,86% dimana untuk kriteria sangat efisien apabila angka persentase di bawah 60%. Untuk tahun 2014 rasio tersebut mengalami kenaikan sebesar 100% dan tahun 2015 nilai persentase sebesar 104,8% angka tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kota Binjai tidak efisien tidak efisien, karena angka persentase tersebut diatas 100%. Kemudian di tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan nilai persentase menjadi kurang efisien. Untuk tahun 2016 nilai persentase menurun menjadi 97,97% dan untuk tahun 2017 mengalami penurunan angka persentase sebesar 78,92% Dimana nilai kurang efisien apabila nilai persentasenya diantara 90%-100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah maka semakin efisien. Jika semakin besar rasio efisiensi keuangan daerah maka semakin tidak efisien (Abdul Halim, 2013).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Binjai berdasarkan penelitian ini yang diukur dengan rasio keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah yang masih dibawah standar keuangan daerah yang dikarenakan masih kurang mempunya pemerintah daerah Kota Binjai dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga menyebabkan pemerintah daerah Kota Binjai bergantung pada pemerintah pusat (pihak ekstren).
2. Rasio efektivitas PAD menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Binjai dinyatakan kurang efektif dalam menjalankan kinerja keuangan pemerintah daerah karena pemerintah daerah belum berhasil dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang telah di rencanakan dengan yang targetkan sesuai dengan potensi rill daerah.
3. Rasio efesiensi menyatakan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai kurang efesien.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Binjai lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap sumber dana dari pemerintah pusat dapat diminisir.
2. Pemerintah Kota Binjai dapat diharapkan mampu untuk meningkatkan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan realisasi anggaran, baik memberikan bimbingan teknis maupun pelatihan dalam pengelolaan data. Dengan begitu penyusunan laporan realisasi anggaran berjalan dengan tepat waktu dan memudahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3. Sebaiknya Pemerintah Kota Binjai diharapkan mampu untuk meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah guna untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan lebih terperinci lagi dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kota Binjai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Iqbal, (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi 3. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Abdul Halim dan Syaf Kusufi.(2012). *Akuntansi Sektor Publik. : teori, konsep dan aplikasi*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat'
- Abdul, Halim, (2012b). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Salemba Empat
- Abdul, Halim , (2012a). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Abdul, Halim, (2012c). *Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi 3. Yogyakarta : Penerbit UPP AMP YKPN
- Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah, (2019). Kota Binjai
- Barudin, Rudi, (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta : UUP STIM YKPN
- Binjai Dalam Angka, (2017) BPS. Kota Binjai
- Chrisna, H. (2019). Analisis Kesiapan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Unpab Dalam Konvergensi IFRS (*International Financial Reporting Standard*). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 1-11.
- Diana, Sari, (2013). *Konsep Dasar Perpajakan* : PT Refika Aditama
- Dwilita, H. (2019). Perbandingan Kinerja Perbankan Indonesia Studi Pada Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2017. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 145-162.
- Ernina. Rasdianto, (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua* : Penerbit Brama Ardian
- Fadly, Y. (2015). Kondisi dan Kritik Sosial pada Masa Rezim Orde Baru dalam Puisi-Puisi WS Rendra.
- Hony, Adhiantoko (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011)*
- Juliani, Dora (2012). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014*
- Lazyra, Ks (2016). *Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan*
- Mahmudi, (2010). *Analisis Laporan Keuangan Daerah : Panduan Bagi Eksekutif DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik : UPP STIM YKPN*
- Maisyarah, R., & Sofyardi, M. (2018, January). *The Effect of Rice Subsidyon The Expenditure of Public Family Consumption And Welfare of Poor Households. In 1st Economics and Business International Conference 2017 (EBIC 2017)*. Atlantis Press.



- Mardismo, (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Adi
- Mardismo, (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Mardismo, (2012). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* Yogyakarta : Penerbit Andi Penulis, 2019
- Mhd, Ichwan Cahyadi (2012) *Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti*
- Muhammad, Mahsun (2009) *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE : Yogyakarta
- Mursyidi, (2009). *Akuntansi Pemerintah Indonesia*. Bandung : Penerbit PT. Refika Aditama
- Nasution, A. P. (2018). Pengaruh *Independence In Fact & Independence In Appearance* Dalam Mempertahankan Sikap Independensi Pada Internal Auditor Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 154-164.
- Nasution, A. P. (2019). Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS: KPP PRATAMA BINJAI). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 207-224.
- Nasution, D. A. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengguna Sistem Informasi Manajemen Daerah-Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 101-114.
- Nasution, N. A. (2019). Tata cara pelaporan pajak terhutang surat pemberitahuan masa terhadap pajak pertambahan nilai pada Cv. Bina rekayasa. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 37-53.
- Panggabean, F. Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(2), 151-159.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Peranggungjawaban Dana Operasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Akuntansi Pemerintah (SAP)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
- Rizkina, M. (2019). Pengaruh Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderating. *JURNAL PERPAJAKAN*, 1(1), 80-94.

- Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek Financial Technology (*Fintech*) Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan. *Kajian Akuntansi*, 19(1), 09-18.
- Setiawan, A., Rini, E. S., Sadalia, I., & Daulay, M. T. (2019). 3. Analysis of Murabahah Financing Marketing Strategy at PT BPRS Amanah Insan Cita, Medan, North Sumatra, Indonesia. *International Journal of Science and Business*, 64-73.
- Sugiono, (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugioyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pertanggung Jawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 29 Tentang Pajak Daerah
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah
- Vanesa, Y. Y., Matondang, R., Sadalia, I., & Daulay, M. T. (2019). 11. The Influence Of Organizational Culture, Work Environment And Work Motivation On Employee Discipline In PT Jasa Marga (Persero) TBK, Medan Branch, North Sumatra, Indonesia. *American International Journal of Business Management (AIJBM)*, 37-45.
- Wachid, (2014). *Analisis Kinerja Pelaksanaan Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 2 No. 2 hlm. 236-242
- Wakhyuni, E., Setiawan, A., Adnalin, A., Sari, D. S., Pane, D. N., Lestario, F., et al. (2018). ROLE OF FOREIGN CULTURE AND COMMUNITY IN PRESERVING CULTURAL RESILIENCE. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 508-516.
- Yunus, R. N. (2018). Analisis Pengaruh Bahasa Merek Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi Jurusan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 13-20.